



Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol.14, No.1, Juni 2017

TRANSFORMASI IDENTITAS KEINDONESIAAN

- Dikotomi Identitas Keindonesiaan dan Kepapuaan Pasca Orde Baru
- Memaknai Kelas Menengah sebagai Aktor Demokrasi Indonesia
- Kuasa Meraih Suara: Relasi Foke-Nara dan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) dalam Pemilu Pilkada DKI 2012
- Peranakan dan Serat Kekancangan: Sebuah Identitas Abdi Dalem Kraton Yogyakarta
- Transformasi Pancasila dan Identitas Keindonesiaan

RESUME PENELITIAN

- Peran Kerja sama IMT-GT dalam Pembangunan Konektivitas ASEAN
- Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Tiongkok: Memperjuangkan Kepentingan Nasional di Tengah Ketidakseimbangan Kekuatan

REVIEW BUKU

- Bahasa sebagai Arena dan Instrumen Kekuasaan

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 14	No. 1	Hlm. 1-108	Jakarta, Juni 2017	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	------------	-----------------------	-------------------

**Jurnal
Penelitian Politik**



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial- politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)
Dr. C.P.F. Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN dan Eropa*)
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)

**Penanggung Jawab
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI
Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si

Dewan Redaksi

Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)
Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

Redaksi Pelaksana

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)
Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

Sekretaris Redaksi

Esty Ekawati, S.IP., M.IP
Devi Darmawan, SH

Produksi dan Sirkulasi

Adiyatnika, A.Md
Prayogo, S.Kom

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Faks. (021) 520 7118, *E-mail*: penerbitan.p2p@gmail.com
Website: www.politik.lipi.go.id | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

ISSN

1829-8001
Terakreditasi No. 726/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol. 14, No. 1, Juni 2017

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Catatan Redaksi	iii
Artikel	
• Dikotomi Identitas Keindonesiaan dan Kepapuaan Pasca Orde Baru Aisah Putri Budiatri	1–15
• Memaknai Kelas Menengah sebagai Aktor Demokrasi Indonesia Wasisto Raharjo Jati	17–29
• Kuasa Meraih Suara: Relasi Foke-Nara dan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI): dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012 Dina Fadiyah	31–44
• Peranakan dan Serat Kekancingan: Sebuah Identitas Abdi Dalem Kraton Yogyakarta Septi Satriani	45–54
• Transformasi Pancasila dan Identitas Keindonesiaan Siswanto	55–68
Resume Penelitian	
• Peran Kerja Sama IMT-GT dalam Pembangunan Konektivitas ASEAN Sandy Nur Ikfal Raharjo, dkk	69–83
• Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Tiongkok: Memperjuangkan Kepentingan Nasional di Tengah Ketidakseimbangan Kekuatan Siswanto, dkk	85–98
Review Buku	
• Bahasa sebagai Arena dan Instrumen Kekuasaan Anggi Afriansyah	99–106
Tentang Penulis	107–108
Pedoman Penulisan	109–113

CATATAN REDAKSI

Arus Globalisasi yang melanda dunia telah membawa perubahan sosial, politik, ekonomi dan budaya. Perubahan tersebut bisa bernilai positif jika globalisasi dimaknai secara bijak. Namun tak sedikit dampak negatif ditimbulkan oleh globalisasi akibat ketidakmampuan kita dalam memaknai dan menanggapi secara bijak. Indonesia, tak lepas dari arus globalisasi ini sehingga pola-pola perilaku masyarakat di segala aspek kehidupan pun bergeser. Kondisi ini memungkinkan terjadinya pergeseran identitas manusia baik itu akibat sosial-budaya maupun politik.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan lima artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan identitas Keindonesiaan. Artikel pertama yang ditulis oleh Aisah Putri Budiatri, ”Dikotomi Identitas Keindonesiaan Dan Kepapuaan Pasca Orde Baru”, memperlihatkan bahwa dikotomi antitesis antara identitas kepapuaan dan keindonesiaan belum selesai, meskipun beberapa upaya penyelesaian konflik, termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus, telah diterapkan. Sebaliknya, dikotomi identitas hari ini justru semakin menajam dan berpotensi memperkeruh konflik.

Artikel berikutnya, “Memaknai Kelas Menengah Sebagai Aktor Demokrasi Indonesia”. Artikel yang ditulis oleh Wasisto Raharjo Jati ini membahas mengenai kelas menengah yang menjadi aktor baru dan menjadi identitas tersendiri dalam demokrasi di Indonesia. Tulisannya membahas mengenai akar demokrasi dalam setiap episode kemunculan kelas menengah dalam demokrasi Indonesia. Dan sejauh mana mereka ikut andil dalam proses demokratisasi di ruang publik. Sementara itu, artikel “Kuasa Meraih Suara: Relasi Foke-Nara Dan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) Dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012” yang ditulis oleh Dina Fadiah menawarkan diskusi mengenai relasi antara Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-

Nara) dengan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012. temuan bahwa ternyata organisasi masyarakat dapat berperan penting dalam sebuah pemilihan. Terbukti dengan adanya elit-elit lokal yang saat ini gencar mengandeng ormas sebagai timsesnya. Keberhasilan pengumpulan suara yang dihasilkan oleh ormas mungkin karena anggota ormas banyak tersebar luas dimana-dimana. Mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dsb. Hal ini membuktikan bahwa ormas menjadi identitas yang ada saat ini sudah tidak dapat dikatakan independen atau tanpa adanya campur tangan politik.

Pergeseran identitas juga terjadi di Kraton Yogyakarta yang dibahas dalam artikel “Peranakan Dan Serat Kekancingan: Sebuah Identitas Abdi Dalem Kraton Yogyakarta” yang ditulis oleh Septi Satriani. Artikel ini membahas bagaimana peranakan dan serat kekancingan menjadi identitas abdi dalem Kraton Yogyakarta. Seperti layaknya dalam organisasi modern, keanggotaannya ditandai dengan salah satunya seragam peranakan. Peranakan tidak sekedar menggambarkan seragam abdi dalem melainkan di dalamnya terkandung makna adanya persaudaraan dan persatuan dengan Raja maupun diantara sesama abdi dalem. Penulis menyimpulkan bahwa peranakan dan serat kekancingan merupakan symbol identitas bagi abdi dalem Kraton Yogyakarta. Dengan menggunakan peranakan dan serat kekancingan maka abdi dalem Kraton Yogyakarta memiliki identitas yang berbeda dengan orang kebanyakan.

Artikel terakhir membahas tentang “Transformasi Pancasila Dan Identitas Keindonesiaan” yang ditulis oleh Siswanto. Pancasila sebagai rujukan kehidupan politik dan sosial semakin melemah di tengah gempuran globalisasi yang semakin kuat mempengaruhi pola pikir dan perilaku bangsa Indonesia. Karenanya, masyarakat Indonesia perlahan

bergerak menuju kondisi kehilangan identitas keindonesiaannya. Oleh karena itu, tulisan ini melihat pentingnya wacana transformasi Pancasila sehingga diharapkan bisa menjadi solusi atas tantangan kebangsaan tersebut. Transformasi Pancasila dapat dilakukan melalui (1) Transformasi bersifat menyeluruh atau holistik, tidak bisa bersifat parsial. (2) Transformasi juga meliputi perubahan pola pikir masyarakat (mindset). (3) Transformasi ini juga perlu di landasi oleh cahaya ilmu pengetahuan.

Selain kelima artikel terkait identitas di atas, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI. Artikel pertama ditulis oleh Sandy Nur Iqbal Raharjo, “Peran Kerja Sama IMT-GT Dalam Pembangunan Konektivitas Asean”. Tulisan ini menganalisis arti penting IMT-GT bagi masing-masing negara anggotanya, implementasi program-program IMT-GT tahun 2012-2016, dan peran IMT-GT dalam membangun konektivitas ASEAN, khususnya di sektor maritim.

Artikel kedua, “Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Tiongkok: Memperjuangkan Kepentingan Nasional Di Tengah Ketidakseimbangan Kekuatan”, ditulis oleh Siswanto. Artikel ini mengkaji arah politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok di masa Reformasi. Seperti diketahui bahwa hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok yang sudah berlangsung sejak dekade 1950-an mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika politik dalam negeri masing-masing negara. Sesuatu yang menggembirakan bahwa di era Reformasi ini kerja sama bilateral tersebut semakin meningkat khususnya dibidang politik dan ekonomi. Hanya saja yang menjadi masalah bahwa kerjasama ini dihadapan kepada kondisi ketidakseimbangan (asymmetric power relations) yang berpengaruh terhadap posisi tawar (bargaining position) masing-masing negara dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Tiongkok sebagai negara dengan kekuatan nasional (nasional power) yang lebih besar akan lebih mudah dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dibanding dengan dengan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan nasional lebih kecil. Untuk mengimbangi hal itu, posisi Indonesia

sebagai negara kekuatan menengah (middle power) bisa menjadi instrumen strategi dalam menghadapi Tiongkok.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan review buku karya Fathur Rokhman & Surahmat “Bahasa Sebagai Arena Dan Instrumen Kekuasaan”. Review yang ditulis Anggi Afriansyah menelaah politik penggunaan bahasa dari beragam aspek. Bahasa tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi tetapi lebih dari itu, bahasa dapat menjadi alat yang digunakan untuk memperoleh kekuasaan. Bahasa beroperasi sebagai piranti kekuasaan dan berhasil dimanfaatkan secara optimal oleh mereka yang memiliki niat berkuasa. Bahasa dapat digunakan untuk praktik dominasi, alat pergerakan, melanggengkan kekuasaan, mendulang suara dan memenangkan pemilihan, sampai meraih keuntungan materil.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya Jurnal Penelitian Politik nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai identitas Keindonesiaan. Selamat membaca.

Redaksi

Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol. 14, No. 1, Juni 2017

DDC: 320.54 : 352.14

Aisah Putri Budiatri

DIKOTOMI IDENTITAS KEINDONESIAAN DAN KEPAPUAAN PASCA ORDE BARU

**Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 1-15**

Narasi tentang dikotomi identitas keindonesiaan dan kepapuaan mewarnai hampir di setiap analisis mengenai identitas politik Papua. Kajian pendahulu berfokus pada pembahasan tentang pengalaman kolonial Belanda, sejarah integrasi Papua dan kegagalan pembangunan masa Orde Baru yang menjadi alasan kunci lahirnya pembelahan identitas antara keindonesiaan dan kepapuaan di Tanah Papua. Masa kolonial dan Orde Baru menjadi fokus studi mereka, karena pada masa ini identitas kepapuaan sebagai antitesis keindonesiaan lahir dan tumbuh semakin tajam. Lalu bagaimana dengan Pasca-Orde Baru? Tulisan ini memperlihatkan bahwa dikotomi antitesis antara identitas kepapuaan dan keindonesiaan belum selesai, meskipun beberapa upaya penyelesaian konflik, termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus, telah diterapkan. Sebaliknya, dikotomi identitas hari ini justru semakin menajam dan berpotensi memperkeruh konflik.

Kata kunci: identitas, Papua, kepapuaan, keindonesiaan, konflik, paska Orde Baru

DDC: 305.5

Wasisto Raharjo Jati

MEMAKNAI KELAS MENENGAH SEBAGAI AKTOR DEMOKRASI INDONESIA

**Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 17-29**

Tulisan ini hendak menganalisis mengenai kelas menengah sebagai aktor demokrasi di Indonesia. Membicarakan kelas menengah dalam setiap diskursus ilmu sosial dan politik di Indonesia senantiasa dihadapkan pada pembahasan ekonomi secara kuantitatif. Hal yang perlu dicatat adalah keberadaan kelas menengah ini daripada didefinisikan lebih baik dirasakan keberadaannya dalam kehidupan. Posisi kelas menengah sebagai aktor politik di Indonesia masih fluktuatif. Hal ini dikarenakan kemunculan kelas menengah dalam arus demokrasi Indonesia yang masih ambigu. Kelas menengah ini bisa menjadi kelompok masyarakat yang tersubordinasi dengan negara, namun di satu sisi, kelas menengah juga tampil sebagai kelas masyarakat yang resisten dengan negara. Adanya transisi posisi dan status kelas menengah tersebut sebenarnya bisa disimak dari gerakan reformasi 1998 hingga sekarang ini. Munculnya berbagai macam gerakan politik dengan mengarustamakan demokrasi yang diinisiasi oleh kelas menengah menjadi hal yang terelakkan pasca reformasi ini. Semula, gerakan tersebut hanya berupa aksi penyampaian aspirasi dan kini sudah berkembang menjadi menjadi aksi penuntutan representasi. Adanya perubahan dalam pilihan aksi dan strategi itu menandakan bahwa kesadaran politik di kalangan kelas menengah Indonesia sendiri sudah semikian merata. Mereka tidak hanya menjadi aktor pasif secara politis namun juga aktif dalam menyuarakan aspirasi dan sekaligus pula representasinya. Menguatnya aksi representasi dari kelas menengah ini merupakan implikasi penting semakin menguatnya ranah societal terhadap

proses political, dan semakin berperannya netizen dalam menyuarakan kebebasan berekspresi, dan lain sebagainya. Tulisan ini akan mengelaborasi lebih lanjut mengenai akar demokrasi dalam setiap episode kemunculan kelas menengah dalam demokrasi Indonesia. Sejauh mana mereka andil dalam proses demokratisasi di ruang publik.

Kata kunci: Demokratisasi, Kelas Menengah, Masyarakat

DDC: 324.6

Dina Fadiyah

**KUASA MERAH SUARA: RELASI
FOKE-NARA DAN FORUM
KOMUNIKASI ANAK BETAWI
(FORKABI) DALAM PEMILUKADA
DKI JAKARTA 2012**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 31-44

Tulisan ini bermaksud melihat relasi antara Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) dengan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) dalam Pemilu DKI Jakarta 2012. Pada dasarnya, Forkabi berdiri karena ketakutan etnis asli Jakarta yaitu etnis Betawi akan luntur karena banyaknya suku pendatang yang ada di Jakarta. Forkabi yang awalnya berdiri berdasarkan etnisitas tetapi kemudian menjelma menjadi perpanjangan politik dari suatu elit lokal. Ormas yang seharusnya bebas dari kepentingan-kepentingan politik, justru menjadi perpanjangan politik dari Foke-Nara selama masa kampanye dalam pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2012. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan didapatkan temuan bahwa ternyata organisasi masyarakat dapat berperan penting dalam sebuah pemilihan. Terbukti dengan adanya elit-elit lokal yang saat ini gencar mengandeng ormas sebagai timsesnya. Keberhasilan pengumpulan suara yang dihasilkan oleh ormas mungkin karena anggota ormas banyak tersebar luas dimana-mana. Mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dsb. Hal ini membuktikan bahwa ormas yang ada saat ini sudah tidak dapat dikatakan independen atau tanpa adanya campur tangan politik.

Kata kunci: Ormas, Forkabi, Patron, Klien

DDC: 302.3

Septi Satriani

**PERANAKAN DAN SERAT
KEKANCINGAN: SEBUAH
IDENTITAS ABDI DALEM KRATON
YOGYAKARTA**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 45-54

Tulisan ini berisi tentang bagaimana peranakan dan serat kekancingan menjadi identitas abdi dalem Kraton Yogyakarta. Seperti layaknya dalam organisasi modern, keanggotaannya ditandai dengan salah satunya seragam peranakan. Peranakan tidak sekedar menggambarkan seragam abdi dalem melainkan di dalamnya terkandung makna adanya persaudaraan dan persatuan dengan Raja maupun diantara sesama abdi dalem. Penulis menyimpulkan bahwa peranakan dan serat kekancingan merupakan symbol identitas bagi abdi dalem Kraton Yogyakarta. Dengan menggunakan peranakan dan serat kekancingan maka abdi dalem Kraton Yogyakarta memiliki identitas yang berbeda dengan orang kebanyakan.

Kata kunci : Identitas, Abdi Dalem Keraton Yogyakarta, Peranakan, Serak Kekancingan

DDC: 320.509598

Siswanto

**TRANSFORMASI PANCASILA DAN
IDENTITAS KEINDONESIAAN**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 55-68

Ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup semakin lama semakin ditinggalkan oleh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai rujukan kehidupan politik dan sosial semakin melemah di tengah gempuran globalisasi yang semakin kuat mempengaruhi pola pikir dan perilaku bangsa Indonesia. Karenanya, masyarakat Indonesia perlahan bergerak menuju kondisi kehilangan identitas keindonesiaannya. Oleh karena itu, tulisan ini melihat pentingnya wacana transformasi Pancasila sehingga diharapkan bisa menjadi solusi

atas tantangan kebangsaan tersebut. Transformasi Pancasila dapat dilakukan melalui (1) Transformasi bersifat menyeluruh atau holistik, tidak bisa bersifat parsial. (2) Transformasi juga meliputi perubahan pola pikir masyarakat (mindset). (3) Transformasi ini juga perlu di landasi oleh cahaya ilmu pengetahuan.

Kata kunci: Globalisasi, Identitas Keindonesiaan, Transformasi Pancasila

DDC: 327

Sandy Nur Ikfal Raharjo

PERAN KERJA SAMA IMT-GT DALAM PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS ASEAN

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 69-83

Indonesia-Malaysia—Thailand Growth Triangle (IMT-GT) merupakan salah satu kerja sama ekonomi subregional yang diakui oleh ASEAN berperan penting dalam membangun konektivitas ASEAN. Namun demikian, perbedaan karakter geografis dan perbedaan kepentingan antartiga negara anggotanya berpeluang menghambat implementasi IMT-GT dalam membangun konektivitas tersebut. Studi ini difokuskan pada tiga hal, yaitu arti penting IMT-GT bagi masing-masing negara anggotanya, implementasi program-program IMT-GT tahun 2012-2016, dan peran IMT-GT dalam membangun konektivitas ASEAN, khususnya di sektor maritim. Melalui metode kualitatif bersifat deskriptif korelatif, studi ini menemukan bahwa IMT-GT berkontribusi hampir 50% bagi perekonomian Malaysia, mendukung visi Poros Maritim Dunia bagi Indonesia, serta mendorong kemajuan wilayah Thailand Selatan yang relatif tertinggal. Temuan lainnya, capaian program IMT-GT 2012-2016 masih rendah, terutama di sisi Indonesia akibat terlalu banyaknya program yang dicanangkan. Terakhir, IMT-GT berperan dalam membangun konektivitas ASEAN melalui pengembangan lima koridor ekonomi, walaupun masih lebih dominan pada dimensi darat dibanding dimensi maritim.

Kata kunci: ASEAN, IMT-GT, konektivitas, dan maritim

DDC: 327.51

Siswanto

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP TIONGKOK: MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN NASIONAL DI TENGAH KETIDAKSEIMBANGAN KEKUATAN

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 85-98

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji arah politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok di masa Reformasi. Seperti diketahui bahwa hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok yang sudah berlangsung sejak dekade 1950-an mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika politik dalam negeri masing-masing negara. Sesuatu yang menggembarakan bahwa di era Reformasi ini kerja sama bilateral tersebut semakin meningkat khususnya dibidang politik dan ekonomi. Hanya saja yang menjadi masalah bahwa kerja sama ini dihadapan kepada kondisi ketidakseimbangan (*asymmetric power relations*) yang berpengaruh terhadap posisi tawar (*bargaining position*) masing-masing negara dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Tiongkok sebagai negara dengan kekuatan nasional (*nasional power*) yang lebih besar akan lebih mudah dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dibanding dengan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan nasional lebih kecil. Untuk mengimbangi hal itu, posisi Indonesia sebagai negara kekuatan menengah (*middle power*) bisa menjadi insturmen strategi dalam menghadapi Tiongkok. Keberadaan sebagai kekuatan menengah didasarkan pada pada sejumlah indentifikasi yaitu kapasitas yang dimiliki dan perilaku politiknya dalam hubungan internasional sebagai inisiator diplomatik dalam mewujudkan stabilitas/keamanan dan perdamaian di kawasan. Akhirnya, sebagai penutup bahwa tulisan ini diharapkan akan memberi masukan terhadap arah politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok sehingga lebih memiliki posisi tawar dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya terhadap Tiongkok di tengah-tengah ketidak seimbangan kekuatan tersebut.

Kata kunci: Politik luar negeri, ketidakseimbangan kekuatan, kepentingan nasional

DDC: 302.222

Anggi Afriansyah

**BAHASA SEBAGAI ARENA DAN
INSTRUMEN KEKUASAAN**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 99-106

Buku ini menelaah politik penggunaan bahasa dari beragam aspek. Bahasa tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi tetapi lebih dari itu, bahasa dapat menjadi alat yang digunakan untuk memperoleh kekuasaan. Bahasa beroperasi sebagai piranti kekuasaan dan berhasil dimanfaatkan secara optimal oleh mereka yang memiliki niat berkuasa. Bahasa dapat digunakan untuk praktik dominasi, alat pergerakan, melanggengkan kekuasaan, mendulang suara dan memenangkan pemilihan, sampai meraih keuntungan materil.

Kata kunci: bahasa, politik, kekuasaan, Indonesia

DDC: 320.54 : 352.14

Aisah Putri Budiatri

THE DICHOTOMY OF INDONESIAN AND PAPUAN IDENTITIES IN THE POST-NEW ORDER ERA

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Page 1-15

The narratives about the dichotomy of Indonesian and Papuan identities are almost founded in every analysis of Papuan political identity. The previous research emphasis on the discussion about the Dutch colonial experience, the history of Papua's integration into Indonesia and the failure of development under New Order era as the key reasons for the genesis of the dichotomy. The colonial periode and New Order era have become their research focus since the Papuan identity as an antithesis of Indonesian-ness was born and grew under this political period. Then, how is about the political identities in Papua under Post-New Order? This article shows that the antithesis dichotomy between Papuan and Indonesian identities still occurs, even though several policies to resolve the conflict, including the Special Autonomy Law, have been implemented. In fact, the dichotomy of identities in Papua has sharpened and potentially worsened the conflict.

Keywords: *identity, Papua, Papuan-ness, Indonesian-ness, conflict, post-New Order*

DDC: 305.5

Wasisto Raharjo Jati

UNDERSTANDING INDONESIAN MIDDLE CLASS AS DEMOCRACY

PILLAR IN INDONESIA

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Page 17-29

This article is aims to analyse middle class as one of the main actors in Indonesian democratization process. Discussion on middle class studies in Indonesian social and political science discourse have been dominated economic understanding based quantitative method. It was an academic challenges for Indonesian social scientist to redefine terminology of middle class. The position of middle class as the political actor in Indonesia still fluctuated due to unclearly standing in terms of relation state and society. On one hand, the middle class could perform as resistant groups against the political regime. In other hand, the Indonesian middle class presumably become subordinated groups towards the political regime. It can be indicated in Indonesia post Authoritarian era, the middle class groups performs itself as the political initiator from grass roots level. That main motivation from Indonesian middle class in recent political era are make alternative representation in order to articulate aspiration. The emergence of internet especially social media have been perceived as political machine that stimulated middle class to make critical points toward government today.

Keyword: *Democratization, Middle Class, Society.*

DDC: 324.6

Dina Fadiyah

UNDERSTANDING INDONESIAN MIDDLE CLASS AS DEMOCRACY PILLAR IN INDONESIA

This paper intends to see the relationship between Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) with Forkabi in Jakarta 2012 Election. Basically, Forkabi stand up because they felt treat from immigrants. Forkabi originally founded on ethnicity but later transformed into a political extension of a local elite. CSOs that were supposed to be free of political interests, became the political extension of Foke-Nara during the campaign period in the 2012 Jakarta Governor election. This paper uses descriptive qualitative method and found that community organizations can play an important role in a local election. Proven with the local elites are currently aggressively used organizations as the tim to win the election. The success of this case because members of mass organizations are widespread everywhere. Starting from the level of RT, RW, Village, District, etc. This proves that the existing mass organizations can not be independent or do not have political interest.

Keywords: Mass Organization, Forkabi, Patron, Client.

DDC: 302.3

Septi Satriani

**PERANAKAN AND SERAT
KEKANCINGAN: AN IDENTITY OF
“ABDI DALEM” IN YOGYAKARTA
PALACE**

This paper focus on how the concept of peranakan and serat kekancingan became the identity of abdi dalem of Kraton Yogyakarta. Peranakan is not just a uniform but the symbol of brotherhood and control of behavior. I assume that the peranakan and serat kekancingan is a symbol of identity. When the abdi dalem wearing a peranakan and having serat kekancingan, they will behave according to the value that contained by them.

Keywords: Identity, Abdi Dalem in Yogyakarta Palace, Peranakan, Serat Kekancingan

DDC: 320.509598

Siswanto

**THE TRANSFORMATION OF
PANCASILA AND INDONESIAN
IDENTITY**

The ideology of Pancasila as the basis of the state and the worldview is increasingly abandoned by the Indonesian nation. Pancasila as a reference of political and social life is weakening in the midst of globalization that influence the mindset and behavior of the Indonesian people. Therefore, the people of Indonesia move to the condition that they lost of Indonesian Identity. This paper sees the importance of discourse about transformation of Pancasila, so that it is expected to be a solution to the challenge of nationality. Transfromasi Pancasila can be done through (1) Transformation is holistic, can not be partial. (2) Transformation also involves about changing the mindset of the community. (3) This transformation also needs to be grounded by the light of science.

Keywords: Globalization, Indonesia Identity, Transformation of Pancasila

DDC: 327

Sandy Nur Ikfal Raharjo

**THE ROLE OF IMT-GT
COOPERATION IN THE ASEAN
CONNECTIVITY DEVELOPMENT**

Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) is recognized as one of the sub-regional cooperation to support ASEAN Community. However, geographical character differences and consequently creating different interests among three member states, is likely to hinder the implementation of the IMT-GT in establishing such connectivity. This study focuses on three issues, namely, the significance of IMT-GT for each member state, implementation of IMT-GT's programs in 2012-

2016, and the role of IMT-GT in building ASEAN connectivity, particularly in the maritime sector. Through correlative descriptive qualitative method, this study found that the IMT sub-region contributes nearly 50% for the Malaysian economy, supports the Indonesian vision of Global Maritime Fulcrum for Indonesia, as well as encourages the development of less-developed Southern Thailand region. In Addition, the implementation of IMT-GT's programs in 2012-2016 was still low, especially on the side of Indonesia due to too many programs were planned. Another finding was that IMT-GT has played significant role in building the ASEAN connectivity through the development of five economic corridors, although it was still more on land connectivity rather than maritime connectivity.

Keywords: ASEAN, IMT-GT, connectivity, and maritime

DDC: 327.51

Siswanto

**INDONESIAN FOREIGN POLICY
TOWARD CHINA:
FIGHTING THE NATIONAL
INTERESTS IN ASYMMETRIC
POWER RELATIONS**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Page 85-98

This paper would like to describe Indonesia's foreign policy towards China in the Reform period. As we known that Indonesia-China bilateral relations have been going on since the 1950s. The relations have ups and downs condition in accordance with the dynamics of domestic politics of each country. It is exciting that in Reform period that bilateral cooperation has been increasing especially in the field of politics and economy. In other hand, there is obstacle in this bilateral cooperation. The cooperation based on imbalance power relation (asymmetric power relations) which will affect to the bargaining position of each country in struggling for national interests. China as a nation with greater national power will be easier in fighting for its national interests compared to Indonesia as a country with smaller national power. To solve the obstacle, Indonesia's position as a middle power country can be a strategic instrument in facing China. Position as an middle power is based on a number of identifications of its capacity and political behavior in international relations

such as ; a diplomatic initiator in realizing stability / security and peace in the region. Finally, in closing remark that this paper is expected to give input to the direction of Indonesian foreign policy towards China so that it has more bargaining position in fighting its national interests against China in the midst of imbalance power (asymmetric power relations)

Keywords: Foreign policy, power imbalance, national interest

DDC: 302.222

Anggi Afriansyah

**LANGUAGE AS FIELD AND
INSTRUMENTS OF POWER**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Page 99-106

This book examines the use of language in variety aspects of life. Language is not only used as a medium of communication but more than that, can be an effective tool to gain power. Language operates as an instrument of power and successfully utilized optimally by those who have the intention to to get power. Language can be used to dominate others, means of struggle, preserve power, won the election, and achieve economic benefits.

Keywords: Language, politic, power, Indonesia

MEMAKNAI KELAS MENENGAH SEBAGAI AKTOR DEMOKRASI INDONESIA

UNDERSTANDING INDONESIAN MIDDLE CLASS AS DEMOCRACY PILLAR IN INDONESIA

Wasisto Raharjo Jati

Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Email : wasisto.raharjo.jati@gmail.com

Diterima: 8 Maret 2017; direvisi: 10 April 2017; disetujui: 29 Mei 2017

Abstract

This article aims to analyze middle class as one of the main actors in Indonesian democratization process. Discussion on middle class studies in Indonesian social and political science discourse have been dominated economic understanding based quantitative method. It was an academic challenges for Indonesian social scientist to redefine terminology of middle class. The position of middle class as the political actor in Indonesia still fluctuated due to unclearly standing in terms of relation state and society. On one hand, the middle class could perform as resistant groups against the political regime. In other hand, the Indonesian middle class presumably become subordinated groups towards the political regime. It can be indicated in Indonesia post Authoritarian era, the middle class groups performs itself as the political initiator from grass roots level. That main motivation from Indonesian middle class in recent political era are make alternative representation in order to articulate aspiration. The emergence of internet especially social media have been perceived as political machine that stimulated middle class to make critical points toward government today.

Keywords: *Democratization, Middle Class, Society.*

Abstrak

Tulisan ini hendak menganalisis mengenai kelas menengah sebagai aktor demokrasi di Indonesia. Membicarakan kelas menengah dalam setiap diskursus ilmu sosial dan politik di Indonesia senantiasa dihadapkan pada pembahasan ekonomi secara kuantitatif. Hal yang perlu dicatat adalah keberadaan kelas menengah ini daripada didefinisikan lebih baik dirasakan keberadaannya dalam kehidupan.

Posisi kelas menengah sebagai aktor politik di Indonesia masih fluktuatif. Hal ini dikarenakan kemunculan kelas menengah dalam arus demokrasi Indonesia yang masih ambigu. Kelas menengah ini bisa menjadi kelompok masyarakat yang tersubordinasi dengan negara, namun di satu sisi, kelas menengah juga tampil sebagai kelas masyarakat yang resisten dengan negara. Adanya transisi posisi dan status kelas menengah tersebut sebenarnya bisa disimak dari gerakan reformasi 1998 hingga sekarang ini. Munculnya berbagai macam gerakan politik dengan mengarustamakan demokrasi yang diinisiasi oleh kelas menengah menjadi hal yang terelakkan *post* reformasi ini. Semula, gerakan tersebut hanya berupa aksi penyampaian aspirasi dan kini sudah berkembang menjadi menjadi aksi penuntutan representasi. Adanya perubahan dalam pilihan aksi dan strategi itu menandakan bahwa kesadaran politik di kalangan kelas menengah Indonesia sendiri sudah semikian merata. Mereka tidak hanya menjadi aktor pasif secara politis namun juga aktif dalam menyuarakan aspirasi dan sekaligus pula representasinya.

Menguatnya aksi representasi dari kelas menengah ini merupakan implikasi penting semakin menguatnya ranah *societal* terhadap proses *political*, dan semakin berperannya *netizen* dalam menyuarakan kebebasan berekspresi, dan lain sebagainya. Tulisan ini akan mengelaborasi lebih lanjut mengenai akar demokrasi dalam setiap episode kemunculan kelas menengah dalam demokrasi Indonesia. Sejauh mana mereka andil dalam proses demokratisasi di ruang publik.

Kata kunci : Demokratisasi, Kelas Menengah, Masyarakat

Pendahuluan

Demokrasi adalah sistem politik dan pemerintahan yang banyak diadopsi oleh berbagai negara di dunia. Ada banyak variasi terhadap demokrasi tersebut mulai dari konsosiasional, parlementer, republikan, dan konstitusional. Kesemuanya tersebut pada dasarnya menuju pada tujuan utama yakni meletakkan kedaulatan rakyat dan supremasi sipil dalam pemerintahan. Namun kemudian, perjalanan menuju demokrasi yang ditempuh oleh setiap negara juga berlainan jenis. Adapun pola pemetaan secara teoritis terhadap alur menuju demokrasi telah banyak diulas oleh berbagai macam akademisi. Mulai dari Lipset, Huntington, Dahl, maupun juga Tocqueville. Berbagai akademisi tersebut melihat konteks kemunculan masyarakat sipil sebagai bentuk transformasi politik kelas menengah dalam demokrasi.

Lipset (2007) dalam *Political Man* melihat adanya konteks pembangunan ekonomi yang masif menginisiasi terhadap tumbuh kembangnya demokrasi¹. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi menginisiasi terhadap adanya rasionalitas masyarakat yang berbasis pada hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena itulah, demokrasi merupakan mekanisme adil dalam mendistribusikan kepentingan masyarakat dan mengubahnya dalam bentuk kebijakan yang memayungi banyak pihak. Kondisi tersebut kemudian mendorong proses representasi masyarakat dalam demokrasi. Seberapa besar wakil yang mereka tempatkan dalam parlemen menandakan adanya kekuatan kelompok kelas. Tumbuhnya masyarakat rasional, atau bisa dikatakan sebagai kelas menengah awal terbentuk dari jalur pendidikan dan ekonomi. Tumbuhnya kelas menengah merupakan era hadirnya “post-politics” dalam masyarakat kontemporer dimana tidak ada lagi konteks “kanan” dan “kiri” dalam politik. Namun yang ada, bagaimana masyarakat membangun kolektivitas politik untuk mempengaruhi kebijakan secara konstitusional. Kolektivitas menjadi kata kunci dalam mengkerangkai kelas menengah sebagai aktor demokrasi.

¹ Martin Seymour Lipset. *Political Man : Basis Sosial Tentang Politik*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003).

Adapun dalam analisis lain yang dikembangkan Tocqueville lebih melihat konteks modal sosial sebagai bagian penting dari kekuatan kolektif tersebut dengan mencontohkan kasus pengalaman demokrasi di Amerika. Pembangunan demokrasi di Amerika sendiri tidak dimulai dari atas dengan model institusionalisasi, namun ditopang oleh berbagai macam organisasi kemasyarakatan (*societal groups*) seperti halnya gereja, LSM, maupun *community service*. Dari situlah kemudian terbentuknya simpul-simpul jaringan soildaritas demokrasi yang kemudian mengikat kuat dalam masyarakat. Entitas *community services* merupakan embrio penting dalam melihat bangunan partisipasi dan representasi politik dari bawah oleh kelas menengah. Simpul jaringan itulah yang berkembang sebagai alat advokasi kepentingan dari level bawah hingga level atas.

Kedua gagasan klasik mengenai kolektivitas tersebut menjadi pintu pembuka melihat konteks kelas menengah yang terdapat di Indonesia. Pertanyaan penting yang perlu dijawab adalah bagaimana situasi dan kondisi kelas menengah Indonesia? dan bagaimana akar demokrasi yang hendak dibangun oleh kelas menengah di Indonesia paska reformasi?. Kedua pertanyaan tersebut berkelindan dalam melihat relasi keduanya dalam pembangunan demokrasi di Indonesia.

Demokrasi dan Munculnya Kelas Menengah

Terdapat dua premis penting dalam memahami relasi kemunculan demokrasi dan kelas menengah yakni “*no bourgeoisie, no democracy*” dan juga “*no taxation without representation*” merupakan dua kata kunci utama². Pemahaman pertama tersebut datang dari Barrington Moore yang melihat bahwa kemunculan kelas-kelas borjuasi telah menjadi pendorong penting terbentuknya demokrasi karena kontribusi mereka terhadap perekonomian. Kontribusi yang dimaksudkan adalah reformasi ekonomi dari semula berbasis agraria menjadi basis industri. Kondisi tersebut berimplikasi penting pada spesialisasi hubungan kerja dan kepentingan masyarakat industri.

² Mochtar Mas'ood, Mochtar, *Negara, Kapital, Dan Demokrasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

Demokrasi menjadi mekanisme penting dalam mengatur hubungan industrial tersebut supaya tidak terjadi adanya konflik sosial yang melanda segenap lapisan masyarakat. Melalui hukum permintaan dan penawaran, demokrasi menjadi sistem menjamin adanya keadilan sosial bagi masyarakat berdasarkan kontribusinya terhadap perekonomian. Hal itu sebenarnya juga merupakan bentuk kritikan terhadap sistem absolutisme kerajaan yang otoriter dan despotis karena sistem stratifikasi sosial yang otoriter telah menyengsarakan masyarakat. Sistem patronase berbasis pada feodalisme telah menjadikan kebebasan masyarakat terbelenggu dan ekspresi masyarakat menjadi terkekang. Basis penguasaan tanah berkelindan dengan penguasaan cacah sehingga memudahkan penguasa mengontrol masyarakat.

Pengalaman yang terjadi di negara-negara Barat menunjukkan gejala tersebut dimana munculnya gilda adalah fondasi awal transisi masyarakat dari agraria menuju perdagangan. Melalui gilda, kemudian diperkenalkan adanya spesialisasi kerja, jaminan upah, dan juga sistem operasional yang menjadi generasi awal terbentuknya demokrasi. Sebelum akhirnya nanti membentuk adanya masyarakat industri, gilda kemudian berkembang menjadi industri yang kemudian berbasis di perkotaan. Hal itulah yang kemudian mendorong terjadinya mobilitas vertikal maupun horizontal. Mobilitas vertikal dapat dimaknai sebagai bentuk kenaikan status sosial dari semula kelas petani menjadi kelas masyarakat industri. Sedangkan, mobilitas horizontal dimaknai sebagai bentuk pembagian kerja yang didasarkan beban kerja yang ditanggung³

Kelas Menengah dan Prinsip Demokrasi Representatif

Hadirnya kelas menengah yang bertransformasi dari masyarakat borjuasi adalah awal pergerakan transformasi penting dari masa feodalisme menuju demokrasi. Penguasaan tanah yang semula menjadi sumber kekuasaan secara bertahap menjadi penguasaan kapital dan tenaga kerja. Dengan kata lain, akar demokrasi generasi

³ Indera Pattinasarany, *Stratifikasi dan Mobilitas Sosial*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2016).

awal kelas menengah adalah semakin meluasnya kepemilikan faktor produksi dan pertukarannya yang adil untuk menjamin semua kepentingan individu maupun kolektif terpenuhi.

Adapun premis kedua yakni *no taxation without representation* ini sebenarnya berangkat adanya protes dari kenaikan pajak yang tinggi, namun tidak diimbangi dengan adanya penyediaan hak dan kewajiban sebagai warga negara⁴. Kondisi itu terjadi dalam masyarakat koloni yang terdapat di Amerika Utara yang telah merasa membayar pajak teh maupun juga kopi yang dilakukan oleh pemerintah Inggris. Resistensi itulah yang kemudian mendorong adanya pergolakan akan adanya tuntutan terhadap representasi lebih meluas, yang itu sebenarnya terkait dengan isu kewarganegaraan. Bahwa berbicara mengenai kewarganegaraan tidaklah berpijak pada pemenuhan kewajiban warga negara terhadap negaranya. Namun juga perlu melihat apa yang perlu disediakan oleh negara terhadap warganya. Representasi menjadi penting dalam artikulasi kepentingan dan aspirasi yang untuk dibawa ke level pembuatan kebijakan publik.

Selain halnya kasus revolusi Amerika yang menjadi patokan, revolusi industri di Inggris juga berlaku hal sama ketika terjadi penggelapan pajak yang dilakukan oleh kalangan bangsawan dan rohaniawan. Kondisi tersebut mendorong terbentuknya *House of Commons* oleh kalangan pedagang, buruh, industrialis, ksatria, maupun intelektual yang notabene embrio awal kelas menengah yang berada di Inggris. Hadirnya *House of Commons* itu adalah anti tesis terhadap *House of Lords* yang diisi oleh kalangan bangsawan yang mekanisme pengangkatannya penuh intrik korupsi, kolusi, dan nepotisme⁵. Sebelumnya di abad yang sama di abad 18, kelas menengah juga mempelopori terjadinya revolusi gerakan demokrasi melawan monarki Prancis. Hal itulah sebelumnya pernah mengilhami adanya piagam Magna Charta dan pembatasan monarki yang semula berbasiskan monarki

⁴ Richard Stanley, *Lessons of American History*. (New York : iUniverse, 2007).

⁵ Aminuddin, Faishal, et.al. *Demokrasi Elektoral (bagian 2) : Sistem dan Perbandingan Pemerintahan*. (Surabaya: Penerbit Sindikasi Indonesia. 2015), hlm.132.

absolut menuju monarki konstitusionalisme. Magna Charta merupakan piagam pengakuan hak asasi manusia maupun juga pengakuan hak warga negara oleh kerajaan. Konteks kewargaan tersebut muncul ketika ketidakjelasan posisi penduduk dalam suatu entitas kerajaan yang sama pengedepanan kewajiban membayar pajak lebih daripada kewajiban negara untuk melindungi negaranya.

Melalui semboyan *Liberté, égalité, fraternité*, dan juga pendirian sidang rakyat bernama *Etats General*, konsep parlemen diciptakan untuk mengawal suara kelas menengah tersebut semasa Revolusi Perancis semasa akhir pemerintahan Raja Louis XVI sekaligus awal pertanda runtuhnya monarki Perancis. Dengan kata lain, pilihan sistem pemerintahan kerajaan yang absolut adalah tiran dan demokrasi adalah harapan bagi sebagian besar kelompok masyarakat kelas menengah yang selama ini dijadikan sebagai objek sapi perah oleh penguasa secara tidak langsung. Adanya pemungutan pajak yang dilakukan secara semena-mena tidak berbanding

lurus dengan adanya pembangunan menyeluruh di semua lapisan masyarakat. Kekuasaan yang sifatnya absolut cenderung destruktif dan koruptif, sedangkan kekuasaan yang pluralis akan memudahkan adanya proses pengawasan satu sama lainnya. Kondisi itulah yang kemudian mendorong adanya pemisahan fungsi kekuasaan politik yang berlaku mutlak hampir di seluruh negara-negara kerajaan di Eropa dimana raja hanya menjadi simbol dan parlemen menjadi pelaksana pemerintahan di bawah pimpinan Perdana Menteri menjadi pilihan penting dalam rangka membatasi kekuasaan. Selain itu dibentuk kekuasaan kehakiman yang tujuannya untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Ketiga prinsip yang berasal dari Revolusi Prancis itulah tersebut juga yang mengilhami berbagai macam pergolakan melawan kolonialisasi di dunia ketiga. Maka secara garis besar jika dibuat ringkas, akar-akar demokrasi kelas menengah yang diambil dari ketiga prinsip tersebut dapat disarikan dalam tabulasi berikut ini.

Tabel 1: Prinsip dan Akar Demokrasi Kelas Menengah

No.	Prinsip-prinsip Nilai	Akar Demokrasi	Implikasi Politik penting
1.	<i>Liberté, égalité, fraternité</i>	<ul style="list-style-type: none"> Kebebasan Berekspresi Persamaan Hak dan Kewajiban Representasi Politik 	<ul style="list-style-type: none"> Dihapuskannya Sistem Kerajaan Dibentuknya Administrator Pembentukan Konsep Parlemen
2.	<i>'no bourgeoisie, no democracy'</i>	<ul style="list-style-type: none"> Representasi bagi kalangan bawah Transparansi Akuntabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> Pembagian Parlemen menjadi dua kamar Berakhirnya Monarki berganti Parlemetarisme Pemilu memilih anggota parlemen dan Perdana Menteri
3.	<i>no taxation without representation</i>	<ul style="list-style-type: none"> Pengakuan Hak Warga Negara yang inklusif Solidaritas dan modal sosial Ikatan kewargaan berbasis pada pemenuhan dan kewajiban Pengakuan terhadap minoritas 	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan negara-negara modern. Munculnya <i>Trias Politica</i> yakni pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Sumber: diolah dari berbagai macam data

Berbagai macam prinsip yang telah diuraikan dalam tabulasi tersebut merupakan basis mendasar dari akar demokrasi yang ditampilkan oleh kelas menengah. Basis modal kelas menengah untuk melakukan perubahan sosial politik terletak pada kepemilikan modal maupun juga tenaga kerja yang kemudian terkonversi dalam bentuk pungutan pajak. Hal itulah yang menjadikan kelas menengah tampil lebih “berkuasa” dibandingkan dengan raja melalui kekuasaan simbol dan biawaran melalui kekuasaan teologis. Melalui kekuasaan material, kelas menengah dapat melakukan pemaksaan terhadap kelompok bangsawan maupun rohaniawan untuk tidak berlaku tiran terhadap masyarakat melalui serangkaian aturan-aturan represif. Melalui kekuasaan material pula, kelas menengah dapat melakukan kontrol massa untuk dapat menggulingkan kekuasaan.

Dari generasi awal mengenai akar demokrasi kelas menengah sebenarnya mengerucut pada parlemen yang merupakan institusionalisasi representasi formal kelas menengah. Parlemen terutama kamar rendah merupakan indikator penting dalam artikulasi aspirasi dari bawah. Kata parlemen sebenarnya berasal dari kata *parle* dalam bahasa Prancis yang berarti berbicara⁶. Hal tersebut sebenarnya merupakan kiasan yang menggambarkan bahwa demokrasi tersebut muncul karena proses representasi yang terhambat sehingga menimbulkan berbagai macam pergolakan masyarakat akar rumput. Terhadap munculnya parlemen baik dalam kasus demokrasi negara berkembang dan negara maju, sebenarnya memiliki akar yang sama yakni keinginan untuk memiliki representasi yang jelas agar aspirasi yang mereka perjuangkan kemudian dapat disampaikan secara formal. Namun dalam perkembangannya, jalur representasi aspirasi yang dilakukan melalui jalur parlemen mengalami banyak perubahan mendasar. Kondisi tersebut juga sebenarnya dipengaruhi oleh pengalaman demokrasi yang berbeda antara negara maju dan negara berkembang sehingga menciptakan struktur parlemen berbeda. Selain itu pula, kondisi berkembangnya kelas menengah yang berbeda antara negara Barat dan negara maju juga

pada akhirnya menentukan pola parlemen dan pembangunan saluran representasi politik yang ingin mereka lakukan dan kerjakan.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa kondisi kelas menengah yang berada di negara maju berada dalam kondisi ekonomi mapan sehingga mereka lebih mengedepankan adanya sikap rasionalitas dalam berpolitik. Implikasinya berdampak pada status dan posisi parlemen yang sepenuhnya netral dari intrik politik. Hal tersebut cukup berbeda dengan kondisi parlemen dalam kasus negara berkembang yang sepenuhnya diselimuti oleh berbagai macam kepentingan politis dan juga berbagai macam kepentingan. Selain itu pula, kondisi kelas menengah juga menjadi pertanyaan kritis dalam membongkar konteks demokratisasi yang berkembang. Berbeda halnya dengan kondisi kelas menengah Barat maupun negara maju lainnya yang sepenuhnya independen dari pengaruh negara. Kelas menengah dalam kasus negara berkembang lahir dan tumbuh pada pola asuhan negara. Hal tersebut didasarkan pada kebutuhan negara untuk membentuk borjuasi baru untuk meningkatkan kegiatan perekonomian⁷. Meskipun kini kelas menengah yang berkembang telah mencoba independen. Namun dalam level tertentu, kelas menengah tersebut masih membutuhkan adanya asistensi dari negara. Konteks negara paska kolonial berpengaruh besar terhadap pembentukan kelas menengah tersebut yang lebih menjaga hubungan independensi dengan negara. Otoritarianisme menjadi simpul penting dalam melihat transformasi kelas menengah yang dependen menuju masyarakat kelas menengah yang independen berkat isu demokrasi yang menjadi pemantik utama. Pengalaman demokrasi yang berkembang dalam berbagai kasus negara berkembang yang mengalami masa transisi dari otoritarianisme menuju demokrasi. Namun terhadap upaya pengawalan demokrasi sebenarnya terdapat berbagai *misleading* yang perlu dilihat dalam melihat perbedaan karakter akar demokrasi kelas menengah yang berada di level negara maju maupun level negara berkembang dapat dilihat dalam komparasi tabulasi berikut ini.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945*. (Yogyakarta : FH UII Press, 2004), hlm. 182.

⁷ Richard Robison. *Indonesia : The Rise of Capital*. (New York : Equinox, 2008).

Tabel 2 : Komparasi Sikap Politik Kelas Menengah

Parameter Demokrasi	Kelas Menengah di Level Negara Maju	Kelas Menengah di Level Negara Berkembang
Basis Partisipasi	Partisipatif-Aktif	Partisipatif-Reaksioner
Representasi	CSO, Partai Politik, Kelompok Masyarakat Sipil lainnya	CSO, Partai Politik, maupun Gerakan Politik
Pilihan terhadap sistem Demokrasi	Demokrasi Parlemerter, Republikanisme	Demokrasi Republikan, Demokrasi Konsosional, maupun Demokrasi Sosialisme
Contoh Revolusi	Revolusi Industri, Revolusi Amerika	Revolusi Beludru, Revolusi Ungu, Revolusi Bolshevik

Sumber diolah dari berbagai macam data

Berdasarkan pada tabulasi tersebut, pilihan sistem demokrasi yang coba diajukan oleh kelompok kelas menengah yang berada di negara berkembang cenderung variatif daripada pilihan sistem demokrasi dalam kasus negara maju. Premis penting yang perlu dicatat dalam membahas perbedaan tersebut adalah akar demokrasi kelas menengah yang berkembang dalam kasus negara Barat dan negara maju pada umumnya lebih berkisar pada bentuk ekspresi kebebasan dan ekspresi ekspresi. Oleh karena itulah, sepanjang kebebasan ekspresi yang mereka disalurkan dan dijamin melalui hukum, maka itulah bentuk ekspresi identitas yang mereka inginkan. Parlemen merupakan manifestasi nyata dari formalisasi kebebasan ekspresi melalui sistem politik. Hal itu cukup berbeda dengan kondisi kelas menengah yang berada dalam kasus negara berkembang. Adanya isu kebebasan ekspresi dan identitas memang menjadi tolok ukur penting, namun perlu dicermati sebenarnya adalah melihat berbagai macam kepentingan kelas menengah yang beraneka ragam mulai dari isu etnisitas, agama, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Kelas menengah yang hadir di negara berkembang juga berlainan jenis dan saling bersaing dalam memperebutkan kepentingan yang ingin diperjuangkan. Maka, menentukan pilihan sistem demokrasi dalam kasus negara berkembang sebenarnya lebih rumit karena beragam kepentingan yang muncul sehingga tawaran sistem demokrasi pada akhirnya mengikuti pola variasi kepentingan tersebut. Kondisi inilah yang menjadi titik krusial

dalam melihat sisi aktivisme kelas menengah dalam kasus negara berkembang, terutama ketika mereka sudah bertransformasi menjadi kalangan elite. Adanya transformasi tersebut sebenarnya ingin mengingatkan kembali bahwa kelas menengah pada dasarnya ingin menegaskan otonomi relatif yang mereka punyai untuk kemudian ditunjukkan kembali. Pengertian otonomi relatif didasarkan pada temuan bahwa kondisi negara paska dekolonialisasi sendiri mengalami masalah mengenai konsolidasi antar elemen masyarakat. Hal tersebut merupakan implikasi penting dari adanya sistem stratifikasi sosial yang dibangun ketika era kolonialisme berkuasa. Masing-masing kelompok masyarakat saling terpecah belah satu sama lainnya sehingga menimbulkan relasi konfliktual.

Hal itulah yang nantinya berimbas pada bentuk penerapan demokrasi yang akan ditegakkan: apakah melalui jalur damai, jalur bersenjata, dan lain sebagainya. Kondisi negara berkembang paska dekolonialisasi masih diselimuti oleh kontestasi berbagai macam faksi masyarakat yang berupaya untuk memperebutkan posisi kekuasaan dalam ruang negara. Oleh karena itulah, bagi kelompok masyarakat yang memiliki basis modal dan massa yang kuat, maka akan memudahkan dirinya untuk bisa bertransformasi menjadi elite. Artinya bahwa loyalitas bagi kalangan kelas menengah tersebut ditentukan oleh seberapa kuat pengaruh politik yang mereka terima dalam iklim patrimonialistik. Dalam perkembangan mutakhir sebenarnya, dikotomi parlemen maupun juga karakter kelas

menengah tersebut menjadi kabur (*blurred*) manakala melihat berbagai macam gejala kemunculan gerakan politik masyarakat global seperti halnya gerakan *#Occupy*, N30, maupun juga Forum Sosial Dunia yang itu semuanya murni digerakkan oleh berbagai macam kelompok masyarakat sipil di berbagai dunia.⁸ Pilihan untuk membangun jalur representasi yang afirmatif melalui jalur parlemen pada masa akhir revolusi industri menjadi pilihan mutlak. Adanya kekuasaan mutlak yang dipusatkan di tangan raja maupun juga tangan biarawan menjadi sesuatu yang perlu dihindari karena pemusatan kekuasaan secara absolut cenderung menciptakan kekuasaan yang koruptif. Representasi menjadi cara sah untuk mereduksi adanya pengaruh absolutisme tersebut. Pluralisme kekuasaan tersebut juga menjadi cara terpenting dalam upaya menjaga keseimbangan pembagian kekuasaan antar lembaga negara. Sementara bagi kelas menengah, representasi dan pembagian kekuasaan adalah bagian dari mekanisme kontrol bagi mereka dalam mengawasi pemerintahan yang selama ini terabaikan oleh negara sebelumnya. Namun kemudian dalam perkembangannya, konteks parlemen ternyata tidak memberikan pengaruh cukup signifikan dalam menyolok dan mendukung adanya sistem demokrasi. Adanya berbagai macam campur tangan kepentingan misalnya saja korupsi, kolusi, maupun nepotisme yang menjadikan parlemen tidak bekerja secara maksimal sebagaimana mestinya.

Terkait dengan adanya berbagai macam revolusi tersebut, maka perlu diperhatikan sebenarnya tipologi revolusi yang dibangun oleh berbagai macam kelompok kelas menengah tersebut. Hal itu terkait pilihan model revolusi yang diinginkan oleh kelas menengah tersebut. Pengalaman demokrasi di berbagai negara menunjukkan bahwa sistem demokrasi yang didirikan berbeda satu sama lainnya. Misalnya demokrasi konsosional, demokrasi liberalisme, demokrasi sosialisme, dan lain sebagainya. Berbagai macam variasi sistem demokrasi itulah yang membedakannya terhadap pembentukan pilihan negara yang akan didopsi. Revolusi menjadi kata kunci menarik dalam mengupas

lebih dalam mengenai akar demokrasi yang terdapat dalam kelas menengah. Adapun pemaknaan mengenai revolusi tersebut pada dasarnya adalah perubahan sosial-politik maupun sosio-budaya yang sifatnya mendasar untuk merubah tatanan yang ada. Jalan untuk meretas perubahan tersebut memiliki berbagai macam jalan untuk melakukan perubahan sosial entah itu melakukan aksi demonstrasi jalanan, aksi huru-hara, perlawanan bersenjata, maupun juga aksi mogok. Keempat jenis *repertoire* itulah yang seringkali digunakan oleh kelas menengah di berbagai tempat dalam menunjukkan kepentingannya menuju demokrasi. Sebenarnya dalam berbagai aksi revolusi tersebut, berbagai macam kepentingan sebenarnya muncul. Namun kemudian bersatu dalam satu payung di bahwa demokrasi. Kata itu menjadi poin penting dalam menyatukan berbagai macam kepentingan kelas menengah yang variatif.

Selain itu, premis penting lainnya yang perlu dicatat dalam melihat revolusi selain halnya pilihan *repertoire* adalah penciptaan mengenai wacana musuh bersama (*common enemy*). Hal itu menjadi penting untuk membangkitkan imaji dan solidaritas bagi segenap kelompok kelas menengah secara lebih luas. Rezim otoritarian selama ini menjadi contoh penting bagi kelompok kelas menengah dalam melakukan gerakan politik secara masif. Implikasinya adalah munculnya pemikiran biner yakni baik dan buruk menjadi dua kata sah untuk membedakan mana yang pantas untuk didukung dan pihak mana yang pantas untuk dijadikan lawan. Pengertian *common enemy* itulah yang kemudian perlu dikembangkan pengertiannya secara definitif dalam menjaga soliditas dan solidaritas kelas menengah dalam mengawal demokrasi.

Akar Demokrasi Kelas Menengah Indonesia: Telaah Per Generasi

Munculnya kelas menengah sebagai aktor demokrasi dalam lanskap politik Indonesia bisa dimaknai secara kritis yakni apakah sebagai aktor kritis atau aktor pragmatis. Hal ini dikarenakan eksistensi kelas menengah Indonesia sangat tergantung dengan relasi kekuasaan. Kondisi tersebut menyebabkan kelas menengah sendiri dianggap sebagai masyarakat ambigu karena

⁸ Wasisto Raharjo Jati, *Pengantar Kajian Globalisasi*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013).

ketidakjelasan posisinya. Namun ditengah keambiguan tersebut justru membuat posisi dan sikap politik kelas menengah menjadi tidak terprediksi arahnya dalam politik Indonesia. Mereka bisa menjadi aktor kritis dengan menjadi *demos* yang secara ideal menjadi kekuatan politik informal di akar rumput, namun di satu sisi mereka juga bisa menjadi aktor yang pragmatis bahkan permisif terhadap kekuasaan. Adanya dualitas sikap politik tersebut sebenarnya mengakar pada dua hal yakni aksesibilitas kekuasaan dan kepentingan. Kedua sumber itu yang menjadikan posisi kelas menengah dianggap penting dalam peta politik di Indonesia.

Melacak mengenai akar demokrasi dalam kasus kelas menengah Indonesia secara garis besar merupakan respons terhadap adanya sistem stratifikasi sosial yang kompleks. Hal tersebut sebenarnya merupakan warisan kolonialisme yang bertujuan mempermudah adanya kontrol kekuasaan dari negara kepada masyarakat. Selain halnya kolonialisme, pada masa paska kolonial ini yang menjadi musuh bersama adalah otoritarianisme dan juga ketidakadilan. Adanya penciptaan musuh bersama tersebut menjadi penting untuk menciptakan adanya kesatuan gerakan politik dalam kelas menengah Indonesia.

Argumentasi lain yang perlu disimak lainnya adalah kemunculan gerakan kelas menengah Indonesia dapat dilacak dari fase gerakan dari tahun ke tahun. Mulai dari generasi tahun 1920-28 yang ditandai dengan munculnya gerakan Boedi Oetomo dan Sumpah Pemuda, tahun 1966 yang ditandai dengan munculnya angkatan 66, tahun 1971 dengan peristiwa Malari, tahun 1998 dengan gerakan demonstrasi 98, dan yang terakhir adalah antara 2009-2014 yang ditandai munculnya gerakan relawan. Masing-masing fase gerakan di setiap gerakan maupun juga wacana besar tersebut menentukan pula pola karakteristik kelas menengah yang menjadi motor gerakan.

Premis penting yang perlu diangkat dalam membedah akar kelas menengah yang berada di Indonesia adalah responsif, emosional, dan juga egaliter. Ketiga karakter tersebut merupakan bentuk kristalisasi karakter yang selama ini muncul dalam dalam setiap gerakan politik. Dikatakan, **responsif** dikarenakan gerakan dan aktivisme politik yang mereka

lakukan senantiasa dikaitkan dengan isu politik yang berkembang saat itu. **Emosional** sendiri terkait dengan karakter psikis politik yang ditampilkan oleh kelas menengah Indonesia yang berupaya menempatkan diri sebagai orang yang senasib berada dalam kondisi tertindas. **Egaliter** dimaksudkan adalah adanya relasi yang seimbang antara kelas menengah Indonesia dalam memperjuangkan artikulasi politiknya. Ketiga penjelasan itulah yang menjadi poin penting dalam melihat seberapa dalam gejala aktivisme yang dimunculkan oleh kelas menengah hari ini.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa gerakan politik kelas menengah Indonesia muncul dari akar stratifikasi sosial yang hierarkis dari masyarakat pluralis sehingga menciptakan adanya gerakan representasi afirmatif. Sebenarnya pengalaman historis mengenai kemunculan gerakan kelas menengah tersebut memiliki akar kesamaan dengan pengalaman Barat yakni adanya pengalaman represif maupun otoritarianisme yang dilakukan rezim penguasa. Namun demikian, yang menjadi titik pembeda adalah jika representasi kelas menengah Barat kemudian diformalkan melalui adanya jalur parlemen sebagai mekanisme sah. Sedangkan, pengalaman kelas menengah pada kasus negara berkembang lebih pada aksi gerakan politik.

Akar pembentukan kelas menengah dalam kasus Indonesia pada generasi awal terbentuk dari adanya kebijakan politik etis dan politik partikelir yang kemudian menghasilkan kelas intelektual dan kelas borjuasi pribumi. Dibukanya kanal pendidikan dan ekonomi secara tidak langsung menciptakan adanya kebebasan informasi yang didapatkan oleh masyarakat Indonesia kala itu. Namun sebenarnya dalih Belanda agar membuka kedua kanal tersebut adalah menyiapkan tenaga administrator yang akan bekerja dalam sistem pemerintahan kolonial. Akan tetapi tujuan awal tersebut meleset, malahan justru lahirlah kelompok masyarakat baru dalam masyarakat Indonesia. Sebelumnya, struktur masyarakat Indonesia diisi oleh golongan Eropa, Timur Asing, dan Pribumi. Maka lahirnya kelompok intelektual dan borjuasi pribumi tersebut merubah pola stratifikasi sosial tersebut. Kelompok pribumi baru tersebut lazim dikenal sebagai “golongan menengah” dalam berbagai

literasi akademik. Dikatakan sebagai golongan menengah dan bukan kelas menengah karena pertimbangan bahwa kelompok baru ini masih terafiliasi dengan pribumi, namun memiliki modal ekonomi dan politik seperti halnya kedua kelas lainnya sehingga disebutkan sebagai “menengah”. Lahirnya golongan menengah pribumi tersebut menandai adanya kebangkitan nasional yang diiringi dengan munculnya berbagai macam organisasi pergerakan lainnya.

Kelas menengah generasi masih sebatas dari kelompok priyayi dan bangsawan yang merupakan hasil transformasi merangkak dari iklim feodalisme menuju modernisme zaman. Hal itu pula yang menandai kraton-kraton di Jawa kemudian membuka diri pada masyarakat secara tidak langsung untuk bisa terakses secara terbuka. Kondisi itulah yang menyebabkan kelas menengah Indonesia pada generasi awal lahir dari masa post feodalisme Jawa menuju modernisme Barat. Meskipun masih sebatas kelompok darah biru, mereka memiliki kesadaran politik yang tinggi terhadap upaya kemerdekaan Indonesia kelak. Adapun di luar tersebut juga lahir kelompok administrator lokal yang bekerja sebagai tenaga administrasi pemerintahan. Pemuda juga menjadi bagian dari kelompok kelas menengah berkat adanya kebebasan pers. Munculnya pers menjadi indikator penting dalam menggugah kesadaran dan rasionalitas berbangsa terutama membangkitkan rasa kritis terhadap kolonialisme Belanda yang telah menyengsarakan rakyat.

Dalam hal ini terdapat dua jalur penting dalam membingkai representasi dan artikulasi politik yang dialamatkan kelas menengah general awal ini. **Pertama**, melalui jalur pendidikan. Jalur seperti ini banyak diinisiasi oleh berbagai kalangan priyayi, bangsawan, pedagang, ulama, dan juga kalangan indo. Mereka kemudian membentuk berbagai macam lembaga pendidikan yang terjangkau bagi kalangan masyarakat luas. **Kedua**, melalui jalur pers. Pers merupakan media penting dalam membangkitkan kesadaran berbangsa dan rasa nasionalisme melawan penjajahan. Hal itulah yang kemudian berdampak pada munculnya resistensi politik. Dari situ kemudian, akar demokrasi kelas menengah Indonesia sendiri bersifat ideologis-

reaksioner dengan kolonialisme sebagai musuh bersama yang dihadapi. Pada akhirnya kedua jalur tersebut melahirkan adanya kebangkitan bangsa sehingga membentuk adanya kemerdekaan. Puncaknya adalah momentum sumpah pemuda dan revolusi kemerdekaan sebagai titik kulminasi resistensi. Kelompok kelas menengah ini lazim dikenal sebagai kelompok generasi 28 dan generasi 45. Kedua tahun tersebut dipilih untuk menandakan tahun penting dalam melihat kebangkitan kelas menengah yang dipelopori oleh kaum pemuda. Tahun 1928 secara jelas adalah momentum lahirnya Sumpah Pemuda yang kemudian diikuti dengan lahirnya Generasi 1945 sebagai penyempurnanya.

Periode 1945 – 1966, terlihat bahwa kelas menengah Indonesia berfokus kepada isu-isu keadilan sosial dan juga pembangunan ekonomi sebagaimana negara baru dalam menata ekonomi paska dekolonisasi. Pemerintah pun meresponsnya dengan cara memberikan kebijakan afirmatif seperti Gunting Syarifuddin maupun juga Ali-Baba untuk membangkitkan perekonomian Indonesia kala itu. Kedua kebijakan tersebut merupakan bentuk inisiatif politik yang diluncurkan oleh pemerintah untuk memperbaiki ekonomi nasional paska dekolonisasi. Dengan kata lain, sebenarnya secara historis kelas menengah Indonesia memang dibentuk oleh negara guna menyokong perekonomian. Namun daripada sibuk urusan ekonomi, kelas menengah Indonesia justru mengalami faksionalisasi politik dalam berbagai bentuk partai politik. Hal itu terkait dengan lahirnya banyak partai politik yang berusaha menjaring masa sebanyak-banyaknya. Posisi kelas menengah yang saat itu belum terlalu kuat basis ekonominya, kemudian hanyut dalam suasana politik. Implikasinya pun berdampak pada salah urus negara yang berdampak pada mega inflasi, dan juga turunya nilai rupiah. Oleh karena itulah, yang mendasari adanya kelas menengah yang terhimpun dalam angkatan 1966 untuk kemudian bangkit melawan rezim tiran tersebut. Angkatan 1966 ditandai dengan munculnya kelompok militer yang menyuarakan dalam kelompok sipil kelas menengah Indonesia yang dikawal oleh gerakan mahasiswa. Akar demokrasi yang mereka bawa adalah otoritarianisme dan komunisme yang dianggap

musuh bersama. Melalui semboyan yang dikenal sebagai Tritura, kelompok kelas menengah ini berupaya keras untuk menyudahi pemerintahan Bung Karno dengan menggantinya dengan suksesornya yang dianggap lebih demokratis. Para figur pemuda seperti halnya Arief Budiman, Jusuf Wanandi, Harry Tjan Silalahi, dan lain sebagainya merupakan tokoh penting dibalik adanya gerakan masif angkatan tahun 1966 tersebut.

Adapun pada masa pergolakan kelas menengah tahun 1974 itu sebenarnya ditandai adanya dua isu penting yang perlu digarisbawahi yakni: 1) munculnya kekuatan militer yang secara aktif mulai menguat dalam pemerintahan. Dengan kata lain, militer berbaju sipil kemudian mengerogoti adanya demokrasi yang diidam-idamkan. 2) masuknya infiltrasi asing terhadap perekonomian Indonesia yang dirasa akan meminggirkan adanya kelompok pengusaha lokal, disamping itu juga karena pemberian kebijakan istimewa terhadap pengusaha Tionghoa, 3) mulai adanya pembatasan kebebasan ekspresi politis dengan mengatasnamakan stabilitas sosial dan politik. Ketiga hal itulah yang mengindikasikan adanya pergolakan kelas menengah Indonesia yang kali ini dilakukan oleh kalangan mahasiswa sebagai motor gerakan. Kulminasinya adalah Peristiwa Malari 1974 yang menghasilkan adanya bentrokan antara publik dengan aparat pemerintah. Sejak saat itulah, rezim Orde Baru sadar akan potensi represif yang dilakukan oleh kelompok kelas menengah Indonesia melalui pengeluaran berbagai kebijakan misalnya saja kebijakan massa mengambang, NKK/BKK, monoloyalitas, dan lain sebagainya. Selain itu, negara juga membentuk kelas masyarakat baru yang dibentuk dari penghasilan migas untuk mereduksi adanya sisi represifitas publik tersebut secara perlahan membuat posisi kelas menengah ini menjadi kelas dependen dengan negara.

Transformasi kelas menengah Indonesia mengalami banyak perubahan terutama dalam melihat basis keanggotaannya. **Pertama**, basis kelas menengah Indonesia yang semula berada dalam luar pemerintahan (*outside of the government*) secara perlahan masuk dalam struktur pemerintahan (*inside of the government*) melalui berbagai macam kebijakan korporatisme

massa⁹ **Kedua**, kelas menengah bukan lagi dianggap sebagai golongan menengah yang lebih berpretensi pada urusan politik, namun diganti dengan golongan fungsional yang sejalan dengan prinsip kekaryaan. **Ketiga**, basis keanggotaan kelas menengah Indonesia juga mengalami perubahan mendasar. Pada angkatan 28, 45, dan 66 lebih banyak didominasi oleh kalangan intelektual ditambah kalangan borjuasi dan priyayi. Adapun setelahnya semenjak tahun 1974, komposisi keanggotaan kelas menengah kini menjadi birokrasi, militer, dan borjuasi yang ketiganya seringkali disebut sebagai Orang Kaya Baru (OKB). Terminologi ini sebenarnya ingin mengindikasikan adanya modernisasi terjadi dalam masyarakat Indonesia dengan adanya pertumbuhan ekonomi tersebut. Selain itu juga istilah OKB menggambarkan adanya masyarakat Indonesia yang maju dengan tingkat konsumerisme yang tinggi. OKB merupakan kelompok masyarakat loyalis pemerintah yang terdistribusi secara merata di semua level masyarakat. Pemerintah senantiasa memberikan subsidi penuh untuk tetap menjaga loyalitas tersebut. **Keempat**, fokus perhatian kelas menengah Indonesia bukan lagi menyoal pada isu-isu HAM, demokrasi, maupun keadilan sosial. Namun lebih kepada pengejaran material, status sosial, maupun juga gaya hidup. Dengan kata lain, Orde Baru telah menjalankan adanya praktik deideologisasi dan depolitisasi masif kepada kelas menengah Indonesia untuk tidak berkembang sebagai kekuatan politik. Pada akhirnya kelas menengah menjadi bagian dari subordinasi negara secara otoritatif dan koersif. Adanya pengedepanan materialisme itulah yang kemudian mewarisi karakter fluktuatif kesadaran politik kelas menengah Indonesia yang mau bergerak ketika ada kepentingan materi yang ingin direngkuh. Maka, secara garis besar, pemetaan mengenai akar demokrasi antara kelas menengah generasi 20, generasi 45, dan generasi 66 dapat dianalisis dalam tabulasi berikut.

⁹ Warsilah, Henny, et.al. *Kelas Menengah dan Demokratisasi*. (Jakarta : LIPI Press, 2005).

Tabel 3 : Nilai-nilai Demokrasi per Angkatan Kelas Menengah

Nama Generasi Kelas Menengah	Konteks Munculnya Gerakan	Nilai-nilai demokrasi yang diusung	Musuh bersama	Implikasi terhadap Perubahan Sosial
Generasi 20	Keterbelakan Ketertindasan	Liberalisme, demokrasi, egalitarianisme	Kolonialisme Hindia Belanda	Sumpah Pemuda dan Proklamasi. Kemerdekaan
Generasi 45	Perjuangan melawan Kemerdekaan	Voluntarisme, egalitarianisme, dan liberalisme	Sekutu	Revolusi Kemerdekaan, perubahan sistem demokrasi dari republikanisme menuju parlementer
Generasi 66	Komunisme, dan otoritarianisme Orde Lama	Demokrasi, HAM, dan supremasi sipil	PKI	Sukses pemerintahan dari Presiden Soekarno menuju Soeharto

Sumber : diolah dari berbagai macam data.

Sebelum terjadinya pergolakan tahun 1998, bibit resistensi yang disuarakan oleh kelompok kelas menengah sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1992. Hal tersebut ditandai dengan adanya negosiasi pemerintah dengan kelompok Islam. Selain itu periode tersebut juga ditandai dengan mengendurnya kekuatan rezim dalam menjaga stabilitas politik. Kondisi itulah yang mendorong adanya diskursus demokrasi kemudian berkembang meluas di kalangan kelas menengah melalui gerakan bawah tanah. Kondisi tersebut terilhami dengan adanya gerakan *people power* dalam kasus Filipina yang berhasil mendorong adanya penegakan demokrasi di negaranya masing-masing. Selain itu momentum demokratisasi gelombang ketiga yang melanda berbagai negara dunia yang pada umumnya melihat adanya berbagai macam kelemahan sistem otoritarianisme rezim. Dalam kasus Indonesia, munculnya berbagai organisasi kerja bawah tanah seperti halnya Forum Demokrasi, Jaringan Kerja Rakyat, Serikat Mahasiswa Demokrasi, dan lain sebagainya menjadi momentum penting terjadinya gerakan politik massa pada tahun 1998.

Kulminasinya adalah demonstrasi 21 Mei 1998 yang kemudian membuat kekuasaan Orde Baru runtuh yang sekali didorong berbagai gerakan politik kelas menengah yang didorong oleh gerakan mahasiswa bersama kelompok marjinal.

Naiknya pamor kelas menengah sebagai faktor determinan dalam demokrasi tersebut sebenarnya juga tidak diprediksi sebelumnya. Dalam analisis awal, turunnya Presiden Soeharto membuat posisi kelas menengah yang dependen dengan negara menjadi terancam karena itu diiringi dengan mengendurnya fondasi perekonomian Indonesia. Namun faktanya kelas menengah Indonesia justru menjadi aktor kuat pendorong demokrasi karena menginginkan adanya perubahan politik yang lebih besar. Perubahan tersebut melingkupi adanya kebebasan berekspresi yang lebih besar termasuk di dalamnya menyampaikan kritik dan saran terhadap pemerintah. Kondisi politik itulah yang membuat kelas menengah semakin berpengaruh baik sebagai kelompok penekan atau kelompok kepentingan. Di saat bersamaan munculnya berbagai macam kemajuann teknologi melalui internet via sosial media pada 2004 awal hingga sekarang ii setidaknya menciptakan adanya dua implikasi penting yakni munculnya dua tipe kelas menengah Indonesia yakni yang berada di dalam pemerintahan (*inside of the government*) maupun juga yang berada luar pemerintahan (*outside of the government*). Selain itu implikasi penting lainnya adalah munculnya transformasi gerakan politik kelas menengah Indonesia yang semula berbasis pada *collective action* menuju pada *connective action* yang

itu membawa implikasi penting terhadap akar demokrasi yang diemban oleh kelas menengah Indonesia¹⁰. Adapun untuk perubahan **pertama**, kelas menengah yang berada dalam pemerintahan tersebut tumbuh dan berkembang sesuai dengan trend pertumbuhan ekonomi, sedangkan kelas menengah yang berada di luar pemerintahan adalah kelas menengah kritis yang lahir paska 1998 dan berkembangnya sosial media dalam masyarakat. Terhadap kelompok kelas menengah golongan pertama ini, trendsnya kemunculannya selalu fluktuatif karena tergantung pada isu politik yang dibahas. Terkhususnya perubahan **kedua**, konteks perubahan dari aksi kolektif menuju aksi konektif mengindikasikan bahwa masyarakat kelas menengah sekarang ini cenderung bertransformasi menjadi masyarakat berjejaring (*networking society*) dalam konteks kekinian.

Maka secara lebih jelasnya konteks akar demokrasi kelas menengah Indonesia paska tahun 1998 dapat dijelaskan dalam tabulasi di bawah.

Dari pemaparan tabulasi tersebut, akar demokrasi yang menonjol dalam perbincangan mengenai representasi dan partisipasi. Kedua hal tersebut merupakan tuntutan utama bagi masyarakat kelas menengah untuk mendapatkan kembali saluran representasi dan partisipasi yang tertutup selama rezim sebelumnya. Hal tersebut cukup dibantu dengan sosial media yang turut berperan sebagai *ice breaker* terhadap permasalahan tersebut. Posisi kelas menengah Indonesia kemudian mengalami penguatan kembali sebagai aktor demokrasi baik sebagai kelompok kepentingan maupun kelompok penekan.

Tabel 4 : Pergeseran Aksi Kelas Menengah Indonesia

Generasi Kelas Menengah 1998	<i>Collective Action</i>	Nilai-nilai Demokrasi	Generasi Kelas Menengah paska 1998	<i>Connective Action</i>	Nilai-nilai Demokrasi
Mahasiswa Buruh Aktivis Seniman Kaum Intelektual	Gerakan demonstrasi jalanan	<i>Good governance</i>	1. Kelompok eksekutif muda	Gerakan massif di dunia maya	Partisipasi
	Isu politik	Akuntabilitas	2. Kelompok borjuasi	Isu sehari-hari	Representasi
	Ideologis	Keadilan Sosial	3. Kelompok intelektual		Inklusifitas
	Tujuan meraih kekuasaan	Transparansi	4. Kelompok marjinal	Tujuan berebut pengaruh	<i>Street-level parliamentary</i>
	Digerakan oleh kelompok inti yang kemudian membesar dalam kelompok massa.			Digerakkan oleh <i>buzzer</i> yang kemudian membesar	

Sumber : diolah dari berbagai macam data

¹⁰ Jati, Wasisto Raharjo, "Cyberspace, Internet, dan Ruang Publik Baru: Aktivisme Online Politik Kelas Menengah Indonesia. Jurnal Pemikiran Sosiologi, 3, (2016): hlm. 25-35

Penutup

Perjalanan politik kelas menengah Indonesia sebagai aktor demokrasi memiliki harapan dan tantangan politik. Dalam hal harapan, kelas menengah dapat diposisikan sebagai penjaga nalar akal sehat publik terhadap demokrasi melalui berbagai sikap politik yang mereka tunjukkan seperti halnya militansi, rasionalitas, maupun juga sikap kritis yang kesemuanya tersebut menjadi modal penting dalam membingkai demokrasi secara keseluruhan. Namun sebagai tantangan adalah posisi kelas menengah Indonesia masih rentan disusupi oleh berbagai macam kepentingan politik praktis. Mereka belum bisa menunjukkan sisi idealitas orisional dari kelompok mereka tersendiri.

Adanya dua mata koin yang berbeda tersebut dalam kelas menengah Indonesia tersebut menunjukkan bahwa posisi kelas menengah sebagai aktor demokrasi masih ambigu. Secara idealitas, kelompok kelas menengah ini memiliki idealisme terhadap sistem demokrasi, namun ketika dibenturkan pada realita yang ada. Maka yang terjadi adalah berbagai macam sikap kompromisitas, konfirmatas, dan negosiasi diajukan kelas menengah agar tetap bertahan sebagai suatu kelompok masyarakat. Alhasil, idealitas tergadaikan dengan upaya mengamankan materi. Maka sebagai agenda mendesak ke depan, kelompok kelas menengah ini perlu merumuskan kembali posisi dan kepentingan yang dirumuskan secara kolektif dan bukan berpretensi sebagai kelompok penangkap isu semata.

Daftar Pustaka

Buku

- Aminuddin, Faishal, et.al. *Demokrasi Elektoral (bagian 2): Sistem dan Perbandingan Pemerintahan*. Surabaya: Penerbit Sindikasi Indonesia. 2015.
- Asshiddiqie, Jimly, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Jati, Wasisto Raharjo, *Pengantar Kajian Globalisasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
- Lipset, Seymour Martin. *Political Man: Basis Sosial Tentang Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Mas' oed, Mochtar, *Negara, Kapital, Dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Pattinasarany, Indera, Stratifikasi dan Mobilitas Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2016.
- Robison, Richard. *Indonesia: The Rise of Capital*. New York: Equinox, 2008.
- Stanley, Richard, *Lessons of American History*. New York: iUniverse, 2007

Jurnal

- Jati, Wasisto Raharjo, "Cyberspace, Internet, dan Ruang Publik Baru: Aktivisme Online Politik Kelas Menengah Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 3, (2016): 25-35

TENTANG PENULIS

Aisah Putri Budiatri

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ia mengenyam pendidikan ilmu politik program sarjana di Universitas Indonesia dan program pasca-sarjana di Rockefeller College, State University of New York at Albany (SUNY at Albany). Beberapa tulisan akademik mengenai partai politik, parlemen, pemilu, konflik Papua, dan perempuan politik telah diterbitkan di dalam jurnal, buku dan dipresentasikan di dalam konferensi nasional dan internasional. Beberapa judul artikel yang telah diterbitkan diantaranya berjudul: “Pengawasan DPR RI 1999-2004: Mewakili Partai, Mengabaikan Rakyat?”, “Representasi Perempuan dalam Pusaran Politik Papua,” “Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR RI dan DPRD),” dan beberapa artikel lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui aisahputrib@gmail.com.

Wasisto Raharjo Jati

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik-LIPI. Pada tahun 2012, ia menamatkan kuliah (S-1) di Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Aktif menulis di berbagai jurnal ilmiah nasional dan Aktif menulis kolom opini juga di berbagai macam media massa, baik lokal maupun nasional. Ia menekuni studi tentang Politik Kelas, Kelas Menengah, Ekonomi-Politik, dan Gerakan Politik. Penulis dapat dihubungi melalui email: wasisto.raharjo.jati@gmail.com

Dina Fadiyah

Penulis adalah staf pengajar di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Telah menyelesaikan S2 Ilmu Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada. Email: dinafadiyah@hotmail.com

Septi Satriani

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Lokal, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ia memperoleh Gelar Sarjana dari Ilmu Politik Universitas Gajah Mada pada tahun 1999 dan Gelar Master dari Ilmu Antropoloti Universitas Gajah Mada pada tahun 2015. Ia menekuni studi politik lokal, politik sumber daya alam, dan studi konflik. Penulis dapat dihubungi melalui: septisatriani@gmail.com.

Siswanto

Penulis kelahiran Jakarta ini menamatkan S1 pada Fakultas Sospol jurusan Hubungan Internasional Universitas Jayabaya Jakarta pada tahun 1986. Selanjutnya mengikuti Program Magister pada Program Studi Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, dan lulus tahun 1997. Gelar doctor diraih pada Fakultas Ilmu Budaya, Jurusan Ilmu Sejarah, Universitas Indonesia, pada tahun 2008. Sejak 1999 menjadi peneliti P2P-LIPI untuk menjabat Kepala Bidang Perkembangan Eropa. Sebagian besar karya ilmiah dan tulisannya membahas tentang kebijakan luar negeri AS dan hubungan Indonesia-AS. Sejak tahun 2008 sampai sekarang menjadi dosen tamu pada Program Studi Kajian Wilayah Amerika, Universitas Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui sish_jakarta@yahoo.com.

Sandy Nur Ikfal Raharjo

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Internasional, Pusat Penelitian Politik-LIPI. S1 ilmu Hubungan Internasional diselesaikan di FISIP Universitas Indonesia. Gelar S2 diperoleh dari Universitas Pertahanan dengan tema Resolusi Konflik. Ia menekuni studi-studi pembangunan wilayah perbatasan, sengketa dan konflik perbatasan, serta isu-isu stabilitas keamanan regional. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: sandy.raharjo@gmail.com.

Anggi Afriansyah

Lahir di Bekasi, 17 April 1987. Setelah menyelesaikan studi sarjana di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Jakarta (2010), ia kemudian melanjutkan studi di Pascasarjana Sosiologi Universitas Indonesia (2014). Pernah menjadi guru di SMAI Al Izhari, Pengajar di Universitas Negeri Jakarta, Universitas Terbuka, Akademi Kebidanan Prima Indonesia, dan STKIP Kusuma Negara, juga pernah menjadi staf di Unit Implementasi Kurikulum (UIK) Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (2015). Saat ini merupakan Peneliti Bidang Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI. Anggi Afriansyah memiliki fokus kajian sosiologi pendidikan. Aktif menulis di media cetak maupun *online*. Beberapa tulisannya sudah dimuat di Koran Berita Cianjur, Jawa Pos, Koran Jakarta, Media Indonesia, Harian Republika, Lampung *Post*, Radar Bangka, Radar Tasikmalaya, Padang Ekspres, NU Online, dan gusdurian.net. Dapat dihubungi melalui afriansyah.anggi@gmail.com.

PEDOMAN PENULISAN

1. Tulisan yang dimuat harus merupakan kajian ilmiah atas isu dan peristiwa yang berkaitan dengan politik dalam negeri dan internasional, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.
2. Tulisan merupakan karya sendiri, bukan saduran atau terjemahan dan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk dan bahasa apa pun.
3. Tulisan mengandung data atau pemikiran yang baru dan orisinal.
4. Tulisan yang dimuat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi penulis yang bersangkutan.
5. Panjang naskah untuk artikel, 20-25 halaman A4, spasi 1,5; *book review*, 10-15 halaman A4, spasi 1,5.
6. Sistematika artikel hasil pemikiran/telaahan adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik); nama dan alamat institusi; alamat e-mail penulis; riwayat naskah; abstrak (maksimum 150 kata dalam bahasa Inggris dan 25 kata dalam bahasa Indonesia); kata kunci (4-5 kata kunci); pendahuluan; pembahasan (terbagi dalam beberapa sub-judul); penutup; daftar pustaka.

JUDUL

Penulis

Nama Instansi

Alamat lengkap instansi penulis

Email penulis

Riwayat naskah

Abstract: Abstract in English (max. 150 words)

Keywords: 4 – 5 words/ phrase

Abstrak: Abstrak dalam bahasan Indonesia (maks. 250 kata)

Kata Kunci: 4 – 5 kata/ frasa

Pendahuluan

Pembahasan

Penutup

Daftar Pustaka

7. Sistematika artikel review buku (*book review*) adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik); nama dan alamat institusi; alamat e-mail penulis; riwayat naskah; judul buku; pengarang; penerbit; cetakan; tebal; abstrak (maksimum 150 kata dalam bahasa Inggris dan 25 kata dalam bahasa Indonesia); kata kunci (4-5 kata kunci); pendahuluan; pembahasan (terbagi dalam beberapa sub-judul); penutup; daftar pustaka.

JUDUL

Penulis

Nama Instansi

Alamat lengkap instansi penulis

Email penulis

Riwayat naskah

Judul buku

Pengarang

Penerbit

Tebal

Abstract: Abstract in English (max. 150 words)

Keywords: 4 – 5 words/ phrase

Abstrak: Abstrak dalam bahasan Indonesia (maks. 250 kata)

Kata Kunci: 4 – 5 kata/ frasa

Pendahuluan

Pembahasan

Penutup

Daftar Pustaka

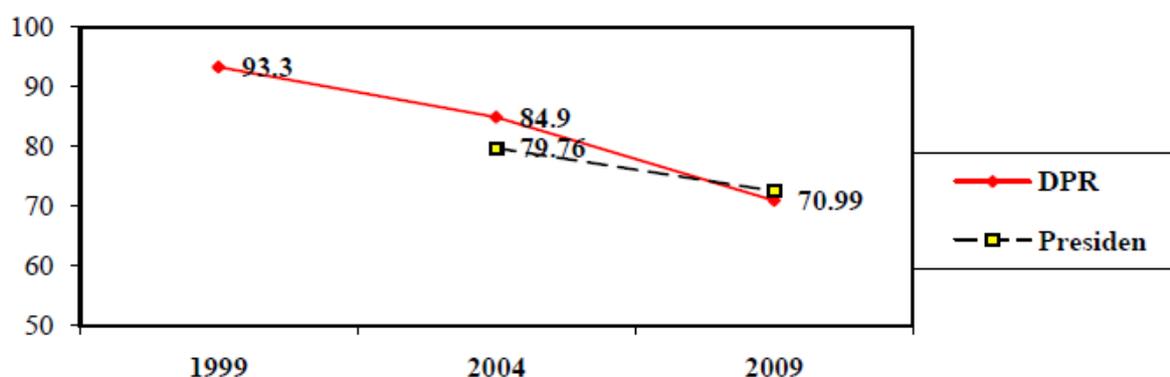
8. Tabel dan gambar, untuk tabel dan gambar (grafik) di dalam naskah harus diberi nomor urut.
 - a. Tabel atau gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar.
 - b. Sumber acuan tabel atau gambar dicantumkan di bawah tabel atau gambar.
 - c. Garis tabel yang dimunculkan hanya pada bagian header dan garis paling bawah tabel. Sedangkan untuk garis vertikal pemisah kolom tidak dimunculkan.

Contoh penyajian Tabel:

Tabel 1. Agenda-agenda Besar Konsolidasi

Domain	Vertikal	Horizontal
Internal	Pemantapan kepengurusan partai hingga level terendah Sosialisasi agenda politik	Pemantapan soliditas elite partai pada level DPP Pemantapan agenda politik menyambut pemilu
Eksternal	Pembangunan, pemeliharaan dan pemantapan dukungan masyarakat	Penjajagan koalisi dengan partai-partai lain dan kalangan institusi-institusi nonpolitik

Contoh penyajian Gambar/Grafik:



Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Grafik 2. Tren Partisipasi dalam Pemilu

9. Perujukan sumber acuan menggunakan *footnotes*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **Format rujukan dari buku:** nama penulis, judul buku (*italic*), kurung buka, kota penerbitan, titik dua, nama penerbit, tahun terbit, kurung tutup, nomor halaman, titik. Contoh:
Denny J.A., *Partai Politik Pun Berguguran*, (Yogyakarta: LKIS, 2006), hlm. v.
 - b. **Format rujukan dari buku (bunga rampai):** nama penulis artikel, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik”, dalam, nama editor buku, judul buku (*italic*), kurung buka, kota penerbitan, titik dua, nama penerbit, tahun terbit, kurung tutup, h., nomor halaman, titik. Contoh:
Leonardo Morlino, “Political Parties and Democratic Consolidation in Southern Europe,” dalam Richard Gunther, P. Nikiforos Diamandouros dan Hans Jurgen Puhle (eds.), *The Politics of Democratic Consolidation: Southern Europe in Comparative Perspective*, (Baltimore MD: Johns Hopkins University Press, 1995), h. 315–388.
 - c. **Format rujukan dari jurnal:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” sumber artikel (*italic*), nomor atau edisi, tahun, h., nomor halaman, titik. Contoh:
Lili Romli, “Peta Kekuatan Politik Setelah Reformasi dan Kecenderungan Koalisi Parpol,” *Jurnal Demokrasi dan HAM*, 2000, h. 124-125.

- d. Format rujukan dari makalah seminar/konferensi:** nama penulis, “judul makalah ditulis tegak dalam dua tanda petik,” makalah, nama/tema seminar, tempat pelaksanaan seminar, waktu, h., nomor halaman, titik. Contoh:

Andrea Ceron dan Alessandra Caterina Cremonesi, “*Politicians Go Social: Estimating Intra-Party Heterogeneity (and its Effect) through the Analysis of Social Media*,” makalah disampaikan pada NYU La Pietra Dialogues on Social Media and Political Participation, Florence, 10-11 Mei 2013, h 3.

- e. Format rujukan dari media online:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” nama situs, tanggal akses situs. Contoh:

Berita8, “Media Sosial bisa Perkuat Fungsi Partai Politik”, 18 April 2013, <http://www.berita8.com/berita/2013/04/MediaSosial-bisa-perkuat-fungsi-partai-politik>, diakses pada tanggal 18 Juni 2013.

- f. Format rujukan dari media massa:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” sumber media (*italic*), tanggal terbit, nomor halaman, titik. Contoh:

Degung Santikarma, “Monumen, Dokumen dan Kekerasan Massal,” Kompas, 1 Agustus 2003, h. 12.

10. Penulisan sumber Daftar Pustaka dibedakan menjadi: buku; jurnal; laporan dan makalah; surat kabar dan website. Daftar Pustaka dituliskan dengan urutan abjad nama belakang (*family name*). Format penulisan sebagai berikut:

- a. Format rujukan dari buku:**

Buku dengan satu pengarang: nama penulis; tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Caplan, Bryan.2007. *The Myth of the Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies*. New Jersey: Princeton University Press.

Buku dengan dua pengarang: nama penulis (dua orang); tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Aspinall, E. dan M.Mietzner. 2010. *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS Publishing.

Buku dengan lebih dari dua pengarang: nama penulis (et al); tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Ananta, Aris, et al., 2004. *Indonesian Electoral Behaviour: A Statistical Perspective*. Singapore: ISEAS Publishing.

Artikel/tulisan dalam buku: nama penulis; tahun terbit; judul tulisan; dalam nama editor; judul buku; tahun terbit; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Qodari, M. 2010. “The Professionalisation of Politics: The Growing Role of Polling Organisation and Political Consultants”, dalam Aspinall, E. dan M. Mietzner (eds.). *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS Publishing.

- b. Format rujukan dari jurnal:** nama penulis; tahun; judul artikel; nama jurnal; volume jurnal; nomor jurnal; nomor halaman. Contoh:

Ufen, A. 2008. "From Aliran to Dealignment: Political Parties in post-Suharto Indonesia". *South East Asia Research*, 16 (1): 5-41.

c. Format rujukan dari laporan dan makalah:

Laporan penelitian: nama penulis; tahun terbit; judul laporan; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Mainwaring, Scott, 1998. "Rethinking Party Systems Theory In The Third Wave Of Democratization: The Importance of Party System Institutionalization." *Working Paper* #260 - October 1998, Kellogg Institute.

Makalah seminar: nama penulis; tahun terbit; judul makalah; nama kegiatan seminar; waktu pelaksanaan kegiatan seminar; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Ceron, Andrea dan Alessandra Caterina Cremonesi. 2013. "Politicians Go Social: Estimating Intra-Party Heterogeneity (and its Effect) through the Analysis of Social Media". Paper disampaikan pada NYU La Pietra Dialogues on Social Media and Political Participation, Florence, 10-11 Mei 2013.

d. Format rujukan dari surat kabar dan website

Artikel media massa: nama penulis; tahun terbit; judul artikel; nama media massa; tanggal terbit; nomor halaman. Contoh:

Wahid, Sholahuddin. 1998. "Di Balik Berdirinya Partai-Partai di Kalangan NU," *Republika*, 3 Oktober.

Artikel online: nama penulis/institusi; tahun terbit; judul artikel, alamat websites; waktu unduh. Contoh:

Aspinall, Edward, "The Taming of Ethnic Conflict in Indonesia", dalam <http://www.eastasiaforum.org/2010/08/05/the-taming-of-ethnic-conflict>, diunduh pada 28 November 2013.

11. Pengiriman Artikel:

- ✓ Naskah dikirim dalam bentuk *printout* sebanyak 2 eksemplar beserta *softcopy* ke alamat redaksi atau dapat dikirimkan melalui email redaksi (penerbitan.p2p@gmail.com).
- ✓ Redaksi memberikan honorarium untuk setiap artikel yang dimuat.
- ✓ Artikel yang diterima setelah *deadline* akan dipertimbangkan untuk dimuat pada edisi berikutnya.
- ✓ Artikel dapat dikirimkan melalui website e-journal dengan alamat <http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jpp> dengan cara mendaftar secara *online*.

12. Alamat Jurnal Penelitian Politik:

P2P-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III dan XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Fax. (021) 520 7118

13. Langganan:

Harga Pengganti ongkos cetak Rp.75.000,- per eksemplar sudah termasuk ongkos kirim biasa. Untuk berlangganan dan surat menyurat langsung hubungi bagian sirkulasi Redaksi Jurnal Penelitian Politik.

Informasi Hasil Penelitian Terpilih

